

MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN BERBASIS ANGGARAN DAN SUBSIDI PEMERINTAH

Oleh

H. Abdulloh Shodiq

ABSTRAK

Lembaga pendidikan pesantren di Indonesia kebanyakan berhaluan Sunni (Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah), dan kini tradisi pesantren telah menyebar di berbagai aspek kehidupan modern sejak tahun 1999. Kehidupan modern tersebut meliputi aspek-aspek baik di bidang kehidupan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan masyarakat ilmiah pedesaan di wilayah Indonesia. Hingga dewasa ini Pemerintah RI cukup memperhatikan pendidikan pesantren dalam bantuan finansial dan pengakuan keberadaannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pada itu, keuangan dan pembiayaan pesantren memerlukan sejumlah investasi dari dana masyarakat atau subsidi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu investasi/subsidi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja.

A. Pesantren dan sosial budaya

Pemerintah Islam yang dikenal pertama kali mencampuri masalah pendidikan adalah Khalifah Nizam al-Mulk (1065 M atau 457 H), seorang penguasa dari Bani Saljuk yang memprakarsai berdirinya madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini berhaluan Sunni dan mempunyai jaringan khusus dengan model pendidikan *al-Kuttab* dan *ar-Ribath* (pondokan tempat kaderisasi ulama) yang berkembang di daratan Hijaz (Haramain). Munculnya lembaga pendidikan *al-Kuttab* dapat ditelusuri sampai kepada masa permulaan Islam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para tawanan perang Badar yang dapat menulis dan membaca untuk mengajar sepuluh anak-anak Madinah. Ahmad Syalabi, (dalam Abuddin Nata, 2010) mengatakan bahwa tumbuhnya *al-Kuttab* yang tugas pokoknya mengajarkan Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam berawal pada zaman permulaan Islam, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian sejak abad kedua dan abad berikutnya, *al-Kuttab* berkembang makin pesat, sehingga sampai di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Kebangkitan madrasah Nizamiyah itu merangsang kebangkitan keilmuan Sunni yang

pada gilirannya mendorong pertumbuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam secara mayoritas, seperti di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam yang mirip dengan keberadaan lembaga dari pendidikan yang terdapat di *al-Kuttab* dan *ar-Ribath* tersebut adalah **pesantren** yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura. Oleh karena itu kebanyakan pesantren di Indonesia berhaluan Sunni (*Ahlu Sunnah wa al-Jama'ab*).

Martin Van Bruinessen seorang Belanda pernah mengatakan bahwa pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam, sedang pusat dari pondok pesantren tradisional adalah kharisma kyai, peranan dan kepribadiannya.

Jadi, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikannya itu, C. Geertz menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa). Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya

menyatu dengan masyarakat. Bahkan Zamakhsyari Dhofier dalam “*International Journal of Pesantren Studies*” mengungkapkan bahwa tradisi pesantren telah menyebar di berbagai aspek kehidupan modern sejak Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, dan kehidupan modern tersebut meliputi aspek-aspek baik di bidang kehidupan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan masyarakat ilmiah pedesaan di wilayah Indonesia.

I. Manajemen pendidikan pesantren

Setiap penyelesaian tugas tertentu yang memerlukan banyak tenaga manusia dan peralatan, akan membutuhkan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Baharuddin mengatakan bahwa manajemen merupakan seni yang dimiliki seorang manajer dalam mengkoordinasikan komponen-komponen produksi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ini menunjukkan bahwa hal penting dalam sebuah kegiatan manajemen adalah bagaimana “seni” seorang manajer melakukan koordinasi pada bawahannya (*subordinators*) dari fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berangkat dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang dimiliki oleh seorang manajer (pemimpin) dalam upaya memanfaatkan sumber daya organisasi atau sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta dilakukan koordinasi pada bawahannya dari fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yang telah

ditentukan melalui usaha orang lain secara efektif dan efisien.

Hampir para ahli ilmu manajemen mengabstraksikan pengertian manajemen itu menjadi 4 proses, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Bagan proses manajemen itu adalah sebagai berikut:



Dari segi proses, manajemen di bidang apapun hampir tidak berbeda, karena selalu dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan. Yang membedakan antara manajemen bidang satu dengan bidang yang lain adalah aspek substansinya, atau bidang garapannya. Hal ini berarti bahwa yang membedakan manajemen pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, dengan manajemen ekonomi atau layanan publik yang lain, bukan pada aspek prosesnya, tetapi pada aspek substansinya. Bahkan menurut Nawawi, substansi manajemen pendidikan dapat disebut manajemen operatif, dan yang menjadi substansi manajemen pendidikan (pesantren) adalah:

1. Kurikulum dan pembelajaran;
2. Peserta didik;
3. Tenaga kependidikan;

4. Sarana dan prasarana;
5. Keuangan; dan
6. Partisipasi masyarakat.

Bila proses manajemen pendidikan dan substansinya tersebut diskemakan, maka tampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Proses dan Substansi Manajemen Pendidikan/pesantren

Substansi Proses	Kurikulum dan pembelajaran	Peserta didik	Tenaga kependidikan	Sarana dan prasarana	Keuangan/ anggaran	Partisipasi masyarakat
Perencanaan						
Pengorganisasian						
Penggerakan						
Pengawasan						

Berangkat dari proses dan substansi manajemen pendidikan pesantren tersebut, maka sesuai dengan topik pembahasan, kami membahas salah satu substansi manajemen pendidikan pesantren yaitu “keuangan atau anggaran” dengan judul: “manajemen mutu pendidikan pesantren berbasis anggaran dan subsidi pemerintah,” di mana substansi anggaran dalam manajemen pendidikan pesantren juga melalui proses diawali dari perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan atau evaluasi.

II. Manajemen pendidikan pesantren berbasis anggaran dan subsidi pemerintah

Pendidikan pesantren merupakan hal utama yang layak dimiliki oleh umat Islam untuk mencapai kemajuan utamanya keagamaan Islam. Kualitas pendidikan pesantren yang baik atau bermutu, tentunya akan memberikan efek positif bagi kemajuan bangsa muslim Indonesia. Pendidikan pesantren, seperti halnya juga pendidikan pada umumnya memiliki banyak aspek yang harus dikelola secara baik dan benar untuk mencapai mutu pendidikan.

Di antaranya seperti konsep dasar administrasi, manajemen kesiswaan, manajemen membiayaan, sarana prasarana, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang baik dalam dunia pendidikan pesantren. Salah satu yang menjadi aspek utama dalam manajemen pendidikan ialah konsep dasar dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Hal ini perlu mendapat kajian tersendiri mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan pesantren dewasa ini. Apabila pengelolaan biaya pendidikan sudah dilakukan dengan tepat tentu akan mempermudah kelangsungan proses pendidikan.

Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. Karena itu pesantren memerlukan sejumlah investasi atau subsidi dari dana masyarakat dan anggaran pemerintah. Investasi/subsidi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan pesantren bila dikelola dengan baik, sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yaitu perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial. Jones (1985) mengemukakan *financial planning is called budgeting*, yang merupakan kegiatan mengkoordinasikan semua sumber dana yang

tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini Gordon mengemukakan bahwa perencanaan penyusunan anggaran pendidikan digunakan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan *tradisional* yang alami dan *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*. Pada umumnya pesantren-pesantren salaf menggunakan manajemen keuangan dengan pendekatan tradisional yang bersifat alami, meski ada beberapa pesantren yang menggunakan pendekatan PPBS.

Pesantren merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi ilmu serta mengeluarkan hasil. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan antara pesantren dengan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah.

Hingga dewasa ini Pemerintah RI cukup memperhatikan pendidikan pesantren, yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan, mulai dari: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*; Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*; dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2014 *Tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren*. Bahkan perhatian Pemerintah kepada pesantren sampai kepada program Indonesia pinter (PIP) pondok pesantren, selain bantuan operasional sekolah yang lain. Hal ini berarti, pesantren yang dianggap sebagai pendidikan keagamaan Islam adalah bagian dari sistem pendidikan yang ikut membangun dan mencerdaskan kehdupan bangsa.

Oleh karena keuangan dan pembiayaan itu dewasa ini cukup menentukan ketercapaian tujuan pendidikan pesantren, maka pesantren perlu memerlukan sejumlah investasi dari dana masyarakat dan anggaran pemerintah, dan investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan pesantren, yaitu *at tafaqqub wat taqaddum fiddin* yang berakhlakul karimah bagi para santri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu al-Futuh dkk, *Al-Mudarris fi al-Madrasah wa-Almujtama'*. Mesir: Maktabah al-Anjlu al-Misriyah, 1983.
- Baharuddin dan Moh Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dhofier, Zamakhsyari, "The Improvement of Universities in Pesantren" dalam *International Journal of Pesantren Studies*, Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren (PSPP) (Center for the Study and Development of Pesantren (CSDP). Volume 3, Number 2, 2009.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tim Pakar Manajemen Pendidikan, *Manajemen Pendidikan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003.
- Van Brinnesen, Martin, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1995.